# LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2024

(Hasil Penilaian Mandiri)



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SEKRETARIAT DPRD



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SEKRETARIAT DPRD

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152 Telepon: (0264) 207908 Faksimile: (0264) 211229

Laman: www.dprdpurwakarta.com, Pos-el: sekretariatdprd.purwakartakab@gmail.com

Purwakarta Maret 2025

Nomor : 700/121/2024

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Hasil Penilaian Mandiri / Evaluasi

atas Implementasi SAKIP Th. 2024

Kepada

Yth. Inspektur Daerah Kab.

Purwakarta

di -

<u>Purwakarta</u>

Dengan init disampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri / Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dengan uraian sebagai berikut:

# I. Pendahuluan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penilaian mandiri atas implementasi SAKIP dilakukan agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (continues improvement). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada pimpinan organisasi. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta maka diperlukan self asesment. Dengan penilaian mandiri ini, diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja (sekretariat/perangkat kerja/seksi/ untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Tujuan evaluasi dengan penilaian mandiri adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja kami dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (resultoriented government).

Secara lebih rinci sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah maupun unit kerja dibawahnya (Sekretariat/Bidang/Sub Bag/Subkor).

Pelaksanaan evaluasi AKIP dengan penilaian mandiri menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

#### II. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yaitu :

Rekomendasi Hasil Evaluasi	Realisasi Tindak Lanjut			
AKIP				
Memperbaiki penetapan indikator	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama yang			
kinerja utama pada keputusan Kepala	ditetapkan dalam Keputusan Kepala			
Dindukcapil tentang Indikator Kinerja	sekretaris DPRD Nomor 700/SK.03/2024			
Utama agar diselaraskan dengan	tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama			
indikator kinerja utama yang	(IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten			
ditetapkan pada dokumen Renstra	Purwakarta Tahun 2024			
tahun 2024-2026				
Melengkapi dokumen LKJIP Sekretariat	Tersusunnya Dokumen LKJIP yang			
DPRD Kabupaten Purwakarta dengan	menyajikan data perbandingan realisasi			
menyajikan perbandingan realisasi	kinerja Dindukcapil dengan realisasi di level			
kinerja Dindukcapil dengan realisasi di	nasional			
level nasional				
	AKIP  Memperbaiki penetapan indikator kinerja utama pada keputusan Kepala Dindukcapil tentang Indikator Kinerja Utama agar diselaraskan dengan indikator kinerja utama yang ditetapkan pada dokumen Renstra tahun 2024-2026  Melengkapi dokumen LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja Dindukcapil dengan realisasi di			

No.	Rekomendasi Hasil Evaluasi	Realisasi Tindak Lanjut			
	AKIP				
3.	Melengkapi dokumen LKJIP Sekretariat	Tersusunnya dokumen LKJIP Sekretariat			
	DPRD Kabupaten Purwakarta dengan	DPRD Kabupaten Purwakarta dengan			
	melengkapi /menambahkan inovasi,	melengkapi / menambahkan inovasi,			
	hambatan yang dihadapi serta	hambatan yang dihadapi serta keberhasilan			
	keberhasilan yang telah dicapai	yang telah dicapai berdasarkan analisisnya			
	berdasarkan analisisnya serta	serta menambahkan informasi analisis			
	menambahkan informasi analisis	efisiensi dan efektifitas capaian kinerjanya			
	efisiensi dan efektifitas capaian				
	kinerjanya				
4.	Melengkapi cascading Sekretariat DPRD	Tersusunnya cascading Sekretariat DPRD			
	Kabupaten Purwakarta sampai pada level	Kabupaten Purwakarta sampai			
	kegiatan beserta indikator kegiatan				
5.	Menyusun Dokumen Laporan Hasil	Tersusunnya dokumen laporan Hasil			
	Evaluasi Renja secara berkala	Evaluasi Renja secara berkala			
	(Triwulanan/Semesteran)	(triwulan/semesteran) tahun 2024			
6.	Mengunggah dokumen yang termasuk	Terunggahnya dokumen yang termasuk			
	dalam daftar informasi publik (	dalam daftar informasi publik ( Laporan			
	Dokumen perencanaan kinerja,	pelaksanaan kegiatan secara berkala,			
	pelaporan kinerja dan laporan	Perjanjian Kinerja) pada website Sekretariat			
	pelaksanaan hasil evaluasi	DPRD Kabupaten Purwakarta			
	renja/Renstra serta Laporan				
	pelaksanaan kegiatan secara berkala,				
	Perjanjian Kinerja) pada website				
	Sekretariat DPRD				
	Kabupaten Purwakarta				

## III. HASIL PENILAIAN MANDIRI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD dengan hasil sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
				Th. 2024 (Hasil PM Internal OPD)
1.	Perencanaan Kinerja	30		24.00
2.	Pengukuran Kinerja	30		24.00
3.	Pelaporan Kinerja	15		10.80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25		17.50
	Nilai Hasil Evaluasi	100		76,30
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Hasil Penilaian Mandiri / evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menunjukkan nilai **75,75** dengan predikat "**BB**". Penjelasan lebih lanjut atas hasil penilaian mandiri AKIP tahun 2023 sebagai berikut:

# 1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Dalam Penyusunan Perencanaan Kinerja telah dikomunikasikan dengan Internal OPD, Eksternal OPD dan Stekholder, Dokumen Perencanaan, sertab Laporan LHE sudah diupload di Website
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

# 2. Pengukuran Kinerja

Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Dalam Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD sudah menggunakan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Juga sudah Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan menerapkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
- Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
- Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

# 3. Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan dan Dokumen Laporan Kinerja telah direviu serta telah Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
- Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

# 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi EvaluasiAkuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja serta Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

#### B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, strategi/rekomendasi yang kami laksanakan sebagai berikut:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu sesuai jadwal.
- Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- 3) Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan secara berjenjang.
- 5) Hasil Evaluasi akuntabilitas agar ditindak lanjuti dengan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

Demikian disampaikan hasil Penilaian Mandiri / evaluasi atas implementasi AKIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, sebagai penerapan manajemen kinerja. Dalam rangka memberikan penilaian yang independen dan obyektif atas implementasi SAKIP terhadap hasil Penilaian Mandiri (PM) tersebut diminta atas bantunnya untuk melaksanakan Penjaminan Kualitas implementasi SAKIP organisasi kami tahun 2024.

Purwakarta Maret 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PURWAKARTA





EKRETARIS DPRD ABUPATEN PURWAKARTA rs. SUHANDI. M.Si

#### Tembusan:

- 1. Bupati Purwakarta(sebagai Laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 3. Ka. Bag Organisasi Setda